

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2023

Salsabila Rocha Ananda¹, Ahmad Zacky Anwary², Eddy Rahman³

¹ Kesehatan Masyarakat, 13201, fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19070529

² Kesehatan Masyarakat, 13201, fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1127028401

³ Kesehatan Masyarakat, 13201, fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1121098601

Email : Chacasalsabilara@gmail.com

Abstrak

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2023 Republik Indonesia. Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan adalah dengan melakukan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Mendorong Pusat Kesehatan Masyarakat untuk menerapkan standar akreditasi dalam rangka meningkatkan dan menjaga kesinambungan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Puskesmas. Implementasi kebijakan merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan pemerintahan. Penelitian dilaksanakan di kota Banjarbaru provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informasi dikumpulkan dari 5 informan yang terbagi dari Dinas Kesehatan, Puskesmas Landasan Ulin, Puskesmas Guntung Payung, Puskesmas Cempaka rawat Inap dan Puskesmas Landasan Ulin. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Puskesmas, Ketua tim akreditasi Puskesmas, Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Perseorangan Penelitian ini berfokus pada aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi/sikap dan aspek birokrasi. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sejauh mana implementasi kebijakan standar akreditasi Puskesmas sudah terlaksana, serta kendala apa dan persiapan apa saja yang dihadapi di Puskesmas dalam pelaksanaan akreditasi. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pusat kesehatan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan akreditasi pusat kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan, Akreditasi, Pelaksanaan*

Daftar pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: FIA UNIBRAW.
- Bambang Sugono, 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bornemisza O. & Sondorp. 2002. *Health Policy Formulation In Complex Political Emergencies and London School of Hygiene & Tropical Medicine University Of London*. Departement of Public Health and Policy. Health Policy Unit London UK
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Edward III, George C., 1980. *Implementing Public Policy*. Englewood Cliffts, N.J. Printice Hall. Inc.
- Grindle, Merilee S (ed). 1980. *Politics and Policy Implementation in the third World*. New Jersey: Princetown University Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2019) *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1335/MenKes/SK/I/2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2022) *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1207/MenKes/SK/III/2012 Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Labolatorium, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Meter, Donald S Van and Carl E Van Horn. 1974. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework Administration & Society*. Sage Publication. Inc.
- Purwanto, dan Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Subarsono Agus, 2006. Drs, *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teory & Aplikasinya* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.